

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penelitian

Warga Negara dan lingkungan merupakan dua konsep yang di dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat dipisahkan. Karena warga Negara sendiri merupakan bagian dari lingkungan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Azwar (dalam Triwardani & Sarmini, 2013, hlm. 472) bahwa “sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat lepas dari lingkungan”. Konsep bahwa warga Negara tidak merupakan bagian dari lingkungan dapat dilihat dari pengertian lingkungan itu sendiri, yaitu:

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar manusia yang memengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan mempunyai arti penting bagi manusia, dengan lingkungan fisik manusia dapat menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan materialnya, dengan lingkungan biologi manusia dapat memenuhi kebutuhan jasmaninya, dan dengan lingkungan sosial manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (Syahri, 2013, hlm. 7)

Memasuki abad 21, kehidupan manusia saat ini mengarah pada kondisi terjadinya kekacauan atau “*chaostic*”. Menurut Sudibyo (dalam Saputra, 2015, hlm. 1) terjadinya kondisi demikian dikarenakan beberapa hal; (1) tetap meningkatnya pertumbuhan populas dunia yang melebihi kapasitas produktivitas natural bumi, (2) perkembangan komunikasi dan transportasi yang cepat sehingga menghasilkan “*world interlinkages*” seperti globalisasi ekonomi, perdagangan, krisis lingkungan, masalah pembangunan, kemiskinan, dan lain-lain. Hal senada juga dikemukakan oleh Corten (dalam Wuryan & Syaifullah, 2013, hlm. 109) bahwa “...dalam dekade sekarang ini, bangsa-bangsa di dunia dihadapkan pada krisis berat yakni kemiskinan yang merendahkan martabat manusia, sistem ekologi yang berada di ambang kehancuran, dan struktur-struktur sosial yang sangat keberatan beban. Lebih lanjut lagi Cogan (dalam Wuryan & Syaifullah, hlm. 110) memprediksi bahwa “...melihat kecenderungan global tersebut , maka kehidupan warga negara, besar kemungkinan akan dihadapkan pada intensitas

konflik sosial yang tinggi, ketidakmerataan, berkurangnya privasi individu, dan terjadinya kerusakan lingkungan...”

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dikatakan bahwa kehidupan saat ini mengakibatkan terjadinya beberapa krisis, salah satu diantaranya adalah krisis lingkungan. Menurut Keraf (dalam Saputra, 2015, hlm. 1) bahwa krisis lingkungan disebabkan oleh kesalahan perilaku, dimana kesalahan tersebut timbul karena kekeliruan perspektif manusia tentang manusia sendiri, alam, hubungan antara manusia dengan seluruh alam semesta. Adapaun kekeliruan perspektif yang dimaksud adalah dimana manusia lebih banyak memanfaatkan daripada memelihara sumber-sumber daya alam di lingkungan yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan lingkungan tersebut. Jika lingkungan mengalami kerusakan dan ketidakseimbangan, pada akhirnya akan membahayakan kehidupan manusia itu sendiri.

Melihat bahwa kondisi lingkungan akhir-akhir ini mengalami krisis yang dapat membahayakan kelangsungan kehidupan manusia, ditambah lagi fakta bahwa warga Negara merupakan bagian dari lingkungan, maka sudah menjadi kewajiban bagi tiap-tiap warga negara untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Bagaimana pun juga, menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan salah satu karakteristik dari warga negara. Hal ini bisa dilihat dari karakteristik warga negara yang dikemukakan oleh Cogan (dalam Wuryan & Syaifullah, 2013, hlm. 108-109) meliputi

- 1) Kemampuan untuk melihat dan mendekati masalah sebagai anggota masyarakat global.
- 2) Kemampuan bekerja dengan orang lain dengan cara kooperatif.
- 3) Kemampuan untuk memahami, menerima, dan toleransi terhadap keragaman budaya.
- 4) Kemampuan untuk berpikir secara sistematis dan kritis.
- 5) Keinginan untuk menyelesaikan konflik secara damai.
- 6) Keinginan untuk mengubah kebiasaan gaya hidup dan konsumtif untuk menjaga lingkungan.
- 7) Kemampuan yang sensitive dan mempertahankan hak-hak asasi manusia

- 8) Keinginan dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik tingkat local, nasional, dan internasional.

Selain itu, sikap peduli terhadap lingkungan juga merupakan salah satu nilai karakter yang harus dimiliki oleh warga negara. Adapun sikap peduli lingkungan yang dimaksud seperti yang dikemukakan oleh Parsalea (dalam Prasetyo & Suyanto, 2013, hlm. 305) bahwa sikap peduli sosial dan lingkungan adalah:

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi dan selalu ingin memberi bantuan bagi orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.

Bagaimana pun juga, kualitas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak setiap warga negara. Hal ini sudah diatur dengan jelas di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H Ayat 1 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Syahri (2013) mengemukakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan mengelola dan melestarikan lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi perusakan lingkungan hidup demi terciptanya lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Dari pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa memiliki sikap peduli lingkungan bukan hanya semata-mata sebagai kewajiban saja, tetapi juga sebagai upaya memenuhi hak warga negara itu sendiri dalam menikmati lingkungan yang bersih, sehat, dan asri.

Setelah mengetahui bahwa sikap peduli lingkungan merupakan sesuatu hal yang penting dan harus dimiliki oleh setiap warga negara, lalu bagaimana caranya untuk mengimplementasikan sikap tersebut sehingga dapat menyelesaikan permasalahan lingkungan? Tentunya perlu ada langkah-langkah atau strategi untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan. Mengingat bahwa hampir semua permasalahan lingkungan berasal dari masyarakat, maka perlu adanya partisipasi penanganan masalah lingkungan. Oleh karena strategi dalam menangani permasalahan lingkungan haruslah strategi yang melibatkan masyarakat sebagai

pelaku utama dalam penanganan lingkungan. Strategi tersebut yaitu melalui *social empowerment* (pemberdayaan masyarakat)

Istilah pemberdayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri berasal dari kata “daya” artinya kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Sedangkan istilah pemberdayaan masyarakat (*social empowerment*) dapat diartikan sebagai proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Menurut Anwas (2013, hlm. 48) bahwa konsep pemberdayaan ini lahir dari kenyataan adanya individu atau masyarakat yang tidak berdaya atau pihak lemah (*powerless*), dimana pihak ini memiliki kelemahan di dalam aspek: pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, modal usaha, relasi, semangat, kerja keras, ketekunan, dan aspek lainnya. Adanya kelemahan atau ketidakberdayaan di berbagai aspek tersebut menyebabkan terjadinya ketergantungan dan kemiskinan.

Baik lingkungan maupun pemberdayaan masyarakat terdapat suatu hubungan. Menurut Mardikanto dan Soebianto (2013) bahwa salah satu tujuan dari pemberdayaan adalah adanya perbaikan lingkungan (*better environment*), dimana jika lingkungan tersebut sudah baik, maka akan terjadi perbaikan kehidupan (*better living*) yang pada akhirnya akan terjadi perbaikan masyarakat (*community better*), dimana masyarakat berdaya karena kondisi lingkungan dan kehidupannya yang baik.

Mardikanto dan Soebianto juga mengemukakan bahwa perbaikan lingkungan dapat terjadi juga masyarakat mempunyai pendapatan yang tinggi. Karena jika masyarakat yang mempunyai pendapatan yang tinggi, maka masyarakat tersebut peduli akan lingkungannya yang dirasa kurang baik. Sebaliknya, jika masyarakatnya kurang berdaya dan memiliki pendapatan yang rendah sering kali tidak peduli akan lingkungan sekitarnya. Oleh karena selain bertujuan untuk perbaikan lingkungan, pemberdayaan juga bertujuan untuk perbaikan pendapatan (*better income*), dimana sebelum adanya perbaikan pendapatan di masyarakat, harus ada perbaikan usaha (*better business*), perbaikan kelembagaan (*better institution*), perbaikan tindakan (*better action*), perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*), dan perbaikan pendidikan (*better accessibility*).

Irfan Fachrurozi, 2018

**PERAN BANK SAMPAH “WARGI MANGLAYANG” DALAM MEMBINA SOCIAL EMPOWERMENT  
WARGA NEGARA DI RW 06 KELURAHAN PALASARI KECAMATAN CIBIRU KOTA BANDUNG**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa keadaan sosial ekonomi masyarakat sangat berpengaruh terhadap kondisi lingkungan sekitar. Oleh karena itu dalam pemberdayaan masyarakat selain untuk menangani permasalahan lingkungan di masyarakat juga dapat memperbaiki keadaan sosial ekonomi masyarakat. Di sinilah perlu ada suatu model pemberdayaan masyarakat yang dapat memperbaiki dua permasalahan sekaligus, yaitu memperbaiki lingkungan di sekitar masyarakat dan memperbaiki keadaan sosial ekonomi masyarakat tersebut.

Sebelum menetapkan model pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan, harus mengetahui permasalahan lingkungan seperti apa yang sekiranya dapat diselesaikan oleh masyarakat. Karena permasalahan lingkungan sangat banyak jenisnya dan sangat kompleks, sehingga tidak mungkin diselesaikan oleh masyarakat seluruhnya.

Banyak sekali permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia. Mulai dari pencemaran di darat, air, dan udara, masalah kebersihan lingkungan, bencana alam seperti banjir, longsor, gempa bumi, yang disebabkan baik dari alam sendiri maupun faktor kesalahan manusia sendiri, penggudulan hutan yang menyebabkan rusaknya ekosistem, dan masih banyak lagi. Di antara permasalahan lingkungan tersebut, yang selalu terjadi di lingkungan masyarakat adalah masalah kebersihan. Masalah kebersihan lingkungan seperti pekarangan rumah warga, jalan-jalan, dan tanah lapang yang kotor. Adapun yang menjadi sumber utama masalah kebersihan lingkungan masyarakat yaitu sampah yang bertebarnya dan berserakan.

Sampah sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu "...barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi dan sebagainya...". Disadur dari [www.wikipedia.co.id](http://www.wikipedia.co.id) bahwa sebenarnya Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaianya, dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung.

Permasalahan kebersihan dan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah merupakan permasalahan lingkungan yang melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kota Bandung dan begitu menyita perhatian Pemerintah Kota Bandung. Sampah yang dihasilkan oleh warga Kota Bandung cukup besar. Menurut data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung yang

disadur dari publikasi Sampah yang diproduksi di Kota Bandung pada tahun 2016 sebesar 1600 ton per hari, dengan sampah yang dihasilkan dari pemukiman penduduk sebesar 1048,96 ton atau 65% dari jumlah total sampah yang dihasilkan setiap hari (Badan Pusat Statistik Kota Bandung, hlm 126). Dari jumlah tersebut, sampah terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sekitar 1.200 ton dan sisanya tidak terangkut, diolah oleh warga dan dibuang di tempat pembuangan sampah liar. Selain hal tersebut juga tidak ditunjang dengan fasilitas dan prasarana pengangkut yang memadai. Jumlah truk pengangkut sampah saat ini yang ada berjumlah 120 unit, yang seharusnya diperlukan sekitar 140 unit untuk menjangkau 160 TPS di seluruh Bandung. Sedangkan pengangkutan di TPS rata-rata dapat dilakukan seminggu tiga kali. ([www.pikiran-rakyat.com](http://www.pikiran-rakyat.com)).

Melihat kondisi seperti itu, maka wajar jika masalah sampah menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang begitu kompleks di Kota Bandung. Bahkan karena masalah sampah ini lah, beberapa tahun yang lalu Kota Bandung pernah dijuluki “Bandung Lautan Sampah” karena banyaknya tumpukan sampah di jalan-jalan di Kota Bandung.

Mengenai masalah sampah ini, sebenarnya Pemerintah Kota Bandung sudah mengupayakan agar sampah di Kota Bandung bisa ditangani. Di dalam manajemen pengelolaan sampah, Pemerintah Kota Bandung sudah mendirikan sebuah BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang bergerak di bidang pengelolaan sampah, yaitu Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan Kota Bandung. Kemudian di bidang regulasi, telah diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

Melihat bahwa permasalahan sampah merupakan permasalahan lingkungan yang begitu kompleks serta tidak bisa ditangani oleh pemerintah saja, maka kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan sampah ini. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat bukan hanya dilakukan untuk perbaikan kondisi lingkungan di sekitar masyarakat juga, tetapi juga harus ada perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Begitu juga dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk menangani permasalahan sampah, bukan hanya bertujuan untuk mengurangi volume sampah, tetapi juga harus ada suatu cara

bagaimana sampah yang tidak terpakai ini bisa bermanfaat kembali bagi masyarakat, sehingga juga dapat memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat yang kemudian sendiri masyarakat dapat berdaya dengan adanya sampah ini. Oleh karena itu perlu ada suatu model pemberdayaan masyarakat yang tepat dalam mengelola sampah. Salah satu model pemberdayaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah yang saat ini sedang berkembang di Indonesia khususnya di Kota Bandung yaitu melalui Bank Sampah.

Adapun yang dimaksud dengan Bank Sampah adalah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah. Bank sampah dikelola menggunakan sistem seperti perbankan yang dilakukan oleh petugas sukarelawan. Penyetor adalah warga yang tinggal di sekitar lokasi bank serta mendapat buku tabungan seperti menabung di bank. Bank sampah berdiri karena adanya keprihatinan masyarakat akan lingkungan hidup yang semakin lama semakin dipenuhi dengan sampah baik organik maupun anorganik. Sampah yang semakin banyak tentu akan menimbulkan banyak masalah, sehingga memerlukan pengolahan seperti membuat sampah menjadi bahan yang berguna ([www.wikipedia.co.id](http://www.wikipedia.co.id)).

Dari hasil studi peninjauan diketahui bahwa di Kota Bandung terdapat satu kelompok masyarakat yang melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah dengan mendirikan bank sampah, yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Bank Sampah “Wargi Manglayang” yang terletak di RW 06 Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru. Bank Sampah “Wargi Manglayang” didirikan oleh ibu-ibu PKK RW 06 sebagai upaya untuk menanggulangi masalah sampah yang ada di lingkungan RW 06. Hingga kini Bank Sampah “Wargi Manglayang” tetap eksis dan melaksanakan program pemberdayaan yang mengikutsertakan masyarakat di lingkungan sekitar yang juga sebagai nasabah bank sampah tersebut. Adapun program-programnya diantaranya berkaitan dengan mengurangi volume sampah, pelatihan keterampilan mendaur ulang sampah menjadi kompos dan kerajinan yang bernilai ekonomis seperti tas, sarung

galon, dompet, tikar, keranjang belanja, tempat tissue, bingkai foto, celemek dan lain sebagainya, serta program penabungan sampah.

Dengan demikian kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan daur ulang sampah yang sudah lama berjalan di Bank Sampah “Wargi Manglayang” pada kenyataannya program tersebut dapat bertahan tanpa ada bantuan secara kontinu oleh pihak donatur tetapi tetap memberikan kegiatan pemberdayaan terutama berkaitan dengan sampah dan lingkungan menarik untuk diteliti dan dikaji dikarenakan dalam perkembangannya merupakan sesuatu yang tergolong baru dan sangat bermanfaat bagi masyarakat sehingga perlu mendapat masukan sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya, serta masih sedikit dilakukannya studi tentang pemberdayaan khususnya di Bank Sampah Wargi Manglayang Cibiru Bandung. Atas dasar itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berkenaan dengan **“Peran Bank Sampah “Wargi Manglayang” Dalam Membina *Social Empowerment* Warga Negara Di RW 06 Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung”**

## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Bank Sampah “Wargi Manglayang” dalam membina *Social Empowerment* warga negara di RW 06 Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung? Untuk menjawab masalah tersebut, dibuat beberapa pertanyaan penelitian yang mengarah pada jawaban terhadap permasalahan utama penelitian, sebagai berikut:

- 1) Bagaimana eksistensi Bank Sampah “Wargi Manglayang” sebagai *Social Empower* di lingkungan masyarakat RW 06 Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung?
- 2) Program apa saja yang dikembangkan oleh Bank Sampah “Wargi Manglayang” dalam membina *Social Empowerment* warga negara di lingkungan RW 06 Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung?
- 3) Bagaimana langkah-langkah pelaksanaan program yang dikembangkan oleh Bank Sampah “Wargi Manglayang” dalam membina *Social*

*Empowerment* warga negara di lingkungan RW 06 Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung?

- 4) Apa saja hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari adanya program-program yang dikembangkan oleh Bank Sampah “Wargi Manglayang”?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan mengetahui dan mengkaji peran Bank Sampah “Wargi Manglayang” sebagai salah satu kelompok swadaya masyarakat dalam melakukan kegiatan pemberdayaan. Tujuan detail yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah meliputi hal-hal berikut:

- 1) Untuk mengetahui eksistensi Bank Sampah “Wargi Manglayang” sebagai *Social Empower* di lingkungan masyarakat RW 06 Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
- 2) Untuk mengetahui Program apa saja yang dikembangkan oleh Bank Sampah “Wargi Manglayang” dalam membina *Social Empowerment* warga negara di lingkungan RW 06 Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
- 3) Untuk mengetahui langkah-langkah pelaksanaan program yang dikembangkan oleh Bank Sampah “Wargi Manglayang” dalam membina *Social Empowerment* warga negara di lingkungan RW 06 Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
- 4) Apa saja hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari adanya program-program yang dikembangkan oleh Bank Sampah “Wargi Manglayang”.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek teoritis dan aspek praktis. Manfaat dari penelitian ini diharapkan tidak hanya dirasakan peneliti saja, melainkan juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

#### 1.4.1 Teoritis

Irfan Fachrurozi, 2018

**PERAN BANK SAMPAH “WARGI MANGLAYANG” DALAM MEMBINA SOCIAL EMPOWERMENT WARGA NEGARA DI RW 06 KELURAHAN PALASARI KECAMATAN CIBIRU KOTA BANDUNG**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Manfaat teoritisnya yaitu kajian mengenai peran Bank Sampah “Wargi Manglayang” dalam membangun *Social Empowerment* ini semoga semakin memperkaya keilmuan sosial khususnya dalam konsep *Social Empowerment* yang dikaitkan dengan konsep *Citizenship Education* (Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan) sebagai bagian dari konsep Pendidikan Kewarganegaraan yang mengkaji bagaimana agar warga Negara dapat berdaya untuk meningkatkan taraf hidup bangsa. Manfaat lainnya yaitu semoga hasil penelitian ini menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, sehingga luaran dari penelitian ini semakin kaya dan semakin berkembang sebagai bagian dari rumpun ilmu sosial.

## **1.4.2 Praktis**

### **1.4.2.1 Bagi Masyarakat**

- 1) Memberikan informasi kepada masyarakat akan adanya kelompok swadaya masyarakat Bank Sampah “Wargi Manglayang” yang melakukan program pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah .
- 2) Memotivasi masyarakat agar mau berdaya sehingga dapat dan juga memotivasi masyarakat agar mau meningkatkan taraf hidup anggota masyarakat itu sendiri secara mandiri tanpa tergantung bantuan dari pemerintah.

### **1.4.2.2 Bagi Bank Sampah “Wargi Manglayang”**

- 1) Dapat dijadikan bahan untuk evaluasi dan pengembangan program Bank Sampah “Wargi Manglayang” yang lebih baik dalam pemberdayaan masyarakat.
- 2) Sebagai upaya memperkenalkan Bank Sampah “Wargi Manglayang” kepada khalayak luas.
- 3) Dapat dijadikan sumber kajian diskusi untuk peningkatan kualitas sumber daya organisasi Bank Sampah “Wargi Manglayang.

## **1.5 Struktur Organisasi Skripsi**

Adapun struktur organisasi skripsi yang hendak disusun adalah sebagai berikut:

### **1.5.1 Bab I Pendahuluan**

Bab ini merupakan bagian awal dari skripsi yang menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi

### **1.5.2 Bab II Kajian Pustaka**

Bab ini berisi tentang kajian teori-teori yang mendukung penelitian peneliti serta dokumen-dokumen atau data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian.

### **1.5.3 Bab III Metode Penelitian**

Bab ini berisi tentang deskripsi mengenai pendekatan dan metode penelitian, partisipan dan tempat penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, tahap penelitian, serta teknik pengolahan data yang digunakan dalam proses penelitian.

### **1.5.4 Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini mengemukakan tentang hasil penelitian yang telah dicapai meliputi analisis hasil temuan data di lapangan dan hambatan-hambatan.

### **1.5.5 Bab V Simpulan dan Rekomendasi**

Bab ini menyajikan kesimpulan terhadap hasil analisis temuan dari penelitian dan rekomendasi peneliti sebagai bentuk pemaknaan terhadap hasil analisis temuan penelitian.